

QUO VADIS MASA DEPAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MEDIA GLOBAL

Sadari

Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA)
Tambun-Bekasi
arifahmikhlan@gmail.com

Naskah masuk: 23-08-19, direvisi: 25-08-19, diterima: 20-09-19 dipublikasi: 25-10-2019

Abstrak: *Quo Vadis* pendidikan menjadi tuntutan dan sekaligus tuntunan yang diharapkan dalam menentukan masa depan pendidikan bangsa. Keterpaparan dalam ketertinggalan, ketidaktahuan serta gagap teknologi merupakan problematika tersendiri dalam dunia pendidikan, di tambah lagi adanya gagal paham dalam memahami agama dan nasionalisme. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan agama Islam (PAI) menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan nasional di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Kata kunci: *Quo Vadis; Masa Depan Pendidikan Nasional; Media Global*

Abstract: *Quo Vadis* education becomes the demand and at the same time the guidance is expected in determining the future of the nation's education. Exposure to underdevelopment, ignorance and technological stuttering are separate problems in the world of education, plus the failure to understand in understanding religion and nationalism. Citizenship Education (PKn) and Islamic religious education (PAI) are key in the success of national education in Indonesia in facing global challenges

Keywords: *Quo Vadis; The Future of National Education; Global Media*

PENDAHULUAN

Isu-isu dalam pendidikan di antaranya, misalnya pendidikan nasional dan globalisasi, hal itu perlu untuk dilakukan identifikasi dan dicari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoks, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas teritorial geografis, tetapi juga aspek ketahanan kultural serta pilar-pilar utama lainnya yang menopang eksistensi mereka sebagai *nation state* (negara bangsa) yang tidak memiliki *imunitas absolut* terhadap *intrusi* globalisasi.

Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial, dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian,

globalisasi hampir melingkupi semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan sebagainya yang mengarah pada *qua vadis* masa depan pendidikan nasional.

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan global, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Anak usia tujuh sampai lima belas tahun seharusnya mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan "*Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun*".

Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang menyatakan bahwa "*wewenang terbesar bidang pendidikan ada di tangan pemerintah daerah, baik yang menyangkut budget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum*". Namun dalam pelaksanaannya, ternyata di beberapa daerah mendapat kendala, karena kurangnya ketersediaan anggaran pendidikan, padahal berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD.

Kendala lain yang dihadapi sebagian pemerintah daerah adalah karena tidak tercukupinya kebutuhan tenaga pendidik dan untuk mengangkat PNS baru membutuhkan anggaran yang cukup besar pula. Selain pemerintah, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat, untuk itu Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat keputusan Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Saat ini ada dua isu kritis yang perlu disikapi sehubungan dengan perspektif globalisasi dalam kebijakan pendidikan nasional di Indonesia untuk mengarah pada *quo vadis* yang mengarah pada masa depan pendidikan yaitu tentang apakah dunia pendidikan Indonesia siap menghadapi tantangan global dan tantangan atau kendala apa saja yang sedang dihadapi dunia pendidikan Indonesia saat ini serta alternatif solusi dalam menghadapinya?

Upaya besar membangun Indonesia baru yang tercermin dalam konsep masyarakat madani (U. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2010). Istilah masyarakat madani untuk pertama kalinya dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kesetabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu.

Lebih lanjut, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa masyarakat madani mempunyai ciri-ciri yang khas yakni : (1) mempunyai kemajemukan budaya (*multicultural*), (2) mempunyai hubungan timbal-balik (*reciprocity*), dan (3) memiliki sikap saling memahami dan menghargai. Selain cirinya, masyarakat madani mempunyai karakter "*guiding ideas*" yakni berkarakter melaksanakan ide-ide yang mendasar pada prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah dan demokrasi.

Sejalan dengan gagasan tersebut, Dawan Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat nonnegara. Rahardjo menjelaskan lagi bahwa dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

saat ini seakan hanya tinggal hipotesa. Berbagai persoalan yang menerpa—bahkan terkesan sulit untuk dipecahkan—bangsa ini, seakan menghapus cita-cita luhur bangsa. Seakan bangsa yang memiliki dasar pemersatu

berupa “Pancasila Sakti” dengan magnum opusnya “Bhineka Tunggal Ika” tidak mampu lagi memainkan peranannya. (Haji Samsul Nizar dan Syaifuddin, 2010).

Persoalan ini harus dijawab oleh sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena pendidikan memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945: “*untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Harus diakui bersama bahwa pendidikan nasional telah cukup banyak memainkan peranannya secara positif. Akan tetapi keberhasilannya masih belum maksimal dan hanya mampu menyentuh segelintir putra/putri terbaik bangsa. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang ditawarkan masih bersifat parsial. Akibatnya pendidikan yang dilaksanakan hanya mampu menciptakan *out put* yang terpecah.

Paling tidak ada tiga kelompok besar *prototipe out* pendidikan dari sistem yang parsial tersebut yakni (Haji Samsul Nizar dan Syaifuddin, 2010):

1) *Out put* kemampuan intelektual yang mampu menguasai teknologi mutakhir

Pada *out put* seperti ini ternyata, pendidikan kurang mampu menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama. Akibatnya, seringkali berbagai hasil olah keterampilannya kurang memperhatikan nilai-nilai moralitas, bahkan terkesan untuk memperkaya pribadi atau golongan. Kebijakan politik seringkali sulit untuk dirujuk pada etika mana yang diambil. Bahkan sangat sulit untuk dikatakan apakah politik yang dimainkan masih mengemas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika (*moralitas*).

2) *Out put* kemampuan intelektual yang mampu menguasai dan menghayati nilai-nilai luhur etika (*moralitas*)

Pada *out put* ini tidak mampu menguasai teknologi dan dinamika politik yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tak jarang kelompok ini dijadikan sasaran yang

cukup strategis bagi kepentingan politik yang terkadang dijadikan alat untuk “menjustifikasi” berbagai kebijakan pemerintah. Contoh yang bisa diberikan pada *out out* ini adalah pemahaman mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Pkn).

3) *Out put* kemampuan memiliki intelektual yang mampu menguasai ajaran agama

Out put terakhir ini tidak mampu menghayati nilai-nilai luhur sebagai substansi ajaran Islam. Akibatnya, muncul para “ulama” secara keilmuan, tetapi “menggadaikan” agama dalam praktek keseharian. Contoh yang bisa diberikan sebagai model *out put* ini adalah pemahaman mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI).

Berdasarkan ilustrasi tersebut, artikel ini ingin membidik akar penyebab kegagalan dari persoalan pendidikan ini, yakni dengan melakukan analisis atas dua jenis *out put* kedua dan ketiga di atas. Penganalisisan dengan melakukan studi terhadap dua mata pelajaran yang dilakukan di sekolah yakni pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Pkn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Alasan dasarnya, mengingat keduanya adalah dua mata pelajaran yang memberikan dasar pemahaman yang berpengaruh terhadap anak. Pengaruh pendidikan kewarganegaraan pada anak adalah ingin melahirkan pemahaman yang demokratis dan toleran, sedangkan pengaruh pendidikan Agama adalah ingin melahirkan pemahaman dalam menghayati nilai-nilai luhur sebagai substansi ajaran Islam.

Kegagalan program pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam selama ini menginspirasi banyak kalangan, sehingga berkeinginan untuk menemukan format baru pendidikan integrasi di Indonesia. Format yang akan ditawarkan dalam artikel ini adalah melakukan modifikasi dan intergrasi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam.

Melalui model ini diharapkan peserta didik memiliki kecakapan partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Dalam konteks negara kesatuan Indonesia, peserta didik tidak hanya diharapkan cerdas, dan kritis, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam persatuan dan integritas bangsa dan agama. (U. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2010).

Keterpurukan pendidikan semakin diperparah dengan kendurnya sistem yang dikembangkan. Bangsa Indonesia harus menggunakan slogan bahwa "*pengalaman adalah guru yang terbaik*". Pengalaman yang hangat yang terjadi sekarang adalah maraknya "*bom bunuh diri*", maraknya bom bunuh diri banyak pula digemari oleh anak pelajar, akibat pemahaman yang berbeda. Indikasi dalam artikel ini adalah bahwa mengapa hal ini terjadi dikarenakan atas lemahnya konsep pemahaman atas kesetiaan terhadap negara, lemahnya konsep pemahaman yang luas terhadap agamanya. Dengan kata lain pada akhirnya bisa ditilik, indikasinya adalah karena lemahnya pada pemahaman dua mata pelajaran yakni pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang didapat sejak di usia sekolah, yang memang diberikan secara parsial.

Untuk itu artikel ini, menawarkan model pembelajaran baru sejak dini pada peserta didik melalui integrasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan agama Islam (PAI) sebagai *qua vadis* masa depan pendidikan nasional global di Indonesia, sebagai usaha untuk membendung terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman terbesar baik individu, masyarakat dan negara serta agama, untuk itu merupakan tanggungjawab bersama.

Wujud yang menunjukkan pentingnya integrasi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam adalah menjadikan dasar negara sebagai ajaran agama dan ajaran agama sebagai dasar negara. Fenomena selama

ini yang terjadi adalah bahwa ajaran agama sebagai dasar negara, hal ini tidak terlepas dari tiga faktor utama (Muhyar Fanani, 2008). yakni :

- 1) Dalam kasus gerakan Islam Internasional, gerakan mereka banyak dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan dengan sistem politik dan ekonomi global yang tidak adil serta bersifat diskriminatif terhadap dunia Islam
- 2) Secara internal masyarakat muslim tidak puas terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang gagal mewujudkan janji mereka untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, banyak di antara pemimpin-pemimpin dunia Islam yang "loyal" terhadap "tuan-tuan" mereka dari Barat.
- 3) Modernisasi lewat ideologi kapitalis dalam bidang ekonomi dan sekularisasi dalam bidang politik malah telah banyak menciptakan kerusakan alam semesta. Modernisasi juga melahirkan berbagai macam politik kekerasan dan membawa dunia pada "kekosongan" nilai moral dan spiritual.

Atas tiga klasifikasi kasus besar tersebut, pembenahannya adalah dengan jalur dan pendekatan pendidikan. Pendidikan meskipun didefinisikan secara berbeda-beda namun pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu pada kesimpulan awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. (Azyumardi Azra, 2002). Dari definisi kesimpulan besar pandangan pendidikan tersebut memperkuat artikel ini untuk melakukan sebuah analisis terhadap dua mata pelajaran PKn dan PAI, lewat integrasi pemahaman dua mata pelajaran, itulah nantinya dapat menyiapkan generasi muda yang bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat, untuk negara, untuk agama dan untuk Tuhan-nya.

Mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) bila tidak diintegrasikan

maka yang akan terjadi adalah terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Harus diakui bahwa hakekat, fungsi, tujuan dan ruang lingkup dari dua mata pelajaran itu memang berbeda. Untuk dalam artikel ini perlu dipaparkan perbedaan dari dua mata pelajaran PKn dan PAI sebagai berikut:

1) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

a) Dasar Ideologi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. (Sjarkawi, 2009). Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan jatidiri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, pengetahuan, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b) Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil dan berkarakter, setiap kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. (Sjarkawi, 2009).

c) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Tujuan pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu peserta didik memperoleh atau mencapai kompetensi-kompetensi sebagai berikut (Sjarkawi, 2009):

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya serta mempertahankan NKRI-nya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2) Pendidikan Agama Islam (PAI)

a) Dasar Ideologi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dasar sumber pendidikan Islam, oleh sebab itu setiap orang Islam wajib berpedoman kepada kedua dasar tersebut di dalam hidup dan kehidupannya. Apabila umat Islam berpegang teguh dengan kedua dasar dan sumber pendidikan Islam tersebut maka tidak akan tersesat. Melalui kajian Al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dijumpai beberapa prinsip yang terkait erat dengan pengembangan ilmu pendidikan Islam. (Abuddin Nata, 2010).

b) Fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. (PSPP, 2007).

c) Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (PSPP, 2007).

Melihat perbedaan antara mata pelajaran PKn dan PAI tersebut yang sangat signifikan adalah pada dasar ideologi yang digunakan. Mata Pelajaran PKn berideologikan Pancasila sedangkan PAI berideologi al-Qur'an dan as-Sunnah. Artikel ini kemudian menganggap dua hal perbedaan tersebut bukanlah hal yang dianggap remeh, karena bisa berdampak pada dis-integrasi dan bahaya laten.

Satu hal yang menjadi dasar dalam analisis ini adalah telah terbitnya buku dari Masdar Farid Mas'udi (Masdar Farid Mas'udi, 2010), dengan judul : "*Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*", dalam buku itu menjadi dasar dalam melakukan hal yang sama bagaimana mata pelajaran Kewarganegaraan (PKn) dapat di syarah oleh Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan kata lain buku ajar PKn dan PAI harus di modifikasi dan integrasikan secara bersamaan. Sehingga artikel ini sifatnya adalah mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

METODE

Artikel ini membahas tentang *quo vadis* masa depan pendidikan nasional yang relevansinya dengan isu-isu pendidikan nasional dan globalisasi. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif sehingga data yang muncul tidak berupa angka-angka, tetapi berupa uraian kata-kata. Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, namun lebih berorientasi pada pengembangan dan pengetahuan baru yang diperoleh melalui pengumpulan data dalam artikel ini adalah melakukan analisis data pustaka yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Rancangan penelitian berupa pendekatan deskriptif, karena berusaha menjelaskan pada konseptual dan empiris tentang tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Artinya penelitian ini berusaha

mengungkapkan secara subjektif namun tetap berusaha untuk menangka secara objektif secara sistematis dari fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

Subyek penelitian adalah tentang yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan di dunia pendidikan secara global. Adapun penentuan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling yakni pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan tertentu.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2000) menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan lebih banyak bersifat kata-kata baik lisan maupun tulisan, juga tindakan selebihnya berupa dokumen, arsip, dan foto. Adapun data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari manusia dan data sekunder atau non manusia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pustaka, dengan tujuan untuk mengetahui secara tetap mulai dari teori, metode dan pendekatan yang bisa ditawarkan dalam mencapai tujuan pendidikan yang mengarah pada *quo vadis* pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya isu-isu pendidikan kontemporer tidak lepas dari lingkungan sosial budaya dan media teknologi yang ikut berpengaruh besar dalam menentukan paradigma pendidikan Indonesia di masa depan. Untuk itu perlu adanya analisis yang baik secara teoritis. Di bawah ini setidaknya akan menggambarkan terkait dengan pendidikan lingkungan sosial budaya dan media teknologi.

Pendidikan lingkungan Sosial Budaya dan media Teknologi

1) Manusia dan Pendidikan

Hakikat manusia adalah selalu berfikir, manusia sebagai makhluk yang

tertinggi derajatnya dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Namun manusia akan menjadi manusia seutuhnya jika ia hidup dan diasuh dengan cara manusia. Manusia dapat disebut sebagai makhluk pembelajar, dengan otaknya, manusia mengembangkan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hasil karya manusia selalu berubah dan berkembang dari zaman ke zaman. Bedakan sarang burung dan rumah manusia. Bandingkan antara tangga rumah panggung di Kalimantan dengan *eskalator* atau *lift* di gedung bertingkat di kota-kota besar.

2) Kehidupan dan Pendidikan

Kehidupan pada hakikatnya sebagai proses pendidikan yang sebenarnya (*the true educational process*). *Education is not preparation for life; education is life itself*, artinya pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan; pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Demikian John Dewey berpesan kepada kita.

Proses pendidikan telah membentuk manusia secara individual. Proses pendidikan pulalah yang telah membentuk manusia sebagai komunitas, atau bahkan sebagai bangsa dan negara. Seseorang dapat belajar dari sejarah kehidupan suatu bangsa, katakanlah bangsa Jepang, yang melatarbelakangi manusia yang bagaimana yang telah dihasilkan. Ternyata, kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh melimpahnya kekayaan alamnya, tetapi oleh kegigihan bangsa itu dalam perjuangan hidupnya.

Manusia memang unik, manusia yang berhasil karena tempaan kesulitan hidupnya. Tempaan hidup dapat berupa pengalaman, bahkan berupa cobaan hidup yang menderanya. Mereka yang tahan terhadap tempaan hidup ini akhirnya akan membentuk diri manusia yang sesungguhnya.

Ada beberapa contoh bahwa kehidupan sebagai proses pendidikan. Bacalah biografi beberapa orang penting. Misalnya "who's who", biografi para presiden, biografi para tokoh, biografi pada

penemu, dan sebagainya. Tuliskan kembali apa yang telah dibaca.

3) Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan proses transformasi budaya. Pendidikan merupakan proses pewarisan budaya, dan sekaligus pengembangan budaya. *Education enables people and societies to be what they can be* artinya pendidikan membuat manusia dan masyarakat menjadi apa yang mereka inginkan. Demikian Bill Richardson berpesan.

Untuk mewariskan budaya tersebut, proses pendidikan dilakukan melalui tiga upaya yang saling kait-mengait, yaitu: (1) pembiasaan (*habit formation*), (2) proses pengajaran dan pembelajaran (*teaching and learning process*), dan (3) keteladanan (*role model*). (Fuad Hassan, 2004).

Immanuel Kant menyebutkan bahwa manusia merupakan *animal educandum* dan *animal educandus*, artinya makhluk yang dapat dididik dan dapat mendidik. Oleh karena itu, maka sama sekali tidak benar jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa "anak itu tidak dapat dididik". Proses dan metode yang digunakanlah yang kemungkinan tidak tepat digunakan. Justru anak manusia akan menjadi manusia jika melalui proses pendidikan, melalui ketiga upaya tersebut.

Manusia adalah pengemban budaya (*culture bearer*), dan dia akan mewariskan kebudayaannya tersebut kepada keturunannya. Proses pendidikan tidak lain merupakan proses transformasi budaya, yakni proses untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda.

Pengertian pendidikan jauh lebih luas dari pengertian pengajaran. Proses pendidikan bukan hanya sebagai pengalihan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik (*transfer of knowledge and skills*) tetapi juga pengalihan nilai-nilai sosial dan budaya (*transmission of social and culture values and norms*).

4) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan dikenal juga sebagai *miliu* pendidikan. Dalam teori empirisme, *miliu* pendidikan dipercaya mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap keberhasilan proses pendidikan. Sementara teori *nativisme* menafikan pengaruh lingkungan pendidikan, karena bakat dan pembawaan peserta didik dinilai mempunyai pengaruh lebih dominan terhadap proses pendidikan. Bagaimana pun juga teori *konvergensi* sangat mengakui pengaruh antara keduanya, yakni bakat dan pembawaan serta pengaruh lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan antara lain berupa:

- a) Keadaan alam, misalnya pinggir pantai, daerah pedalaman, pegunungan.
- b) Kondisi sosial ekonomi masyarakat, misalnya keadaan sosial ekonomi yang rendah, mata pencaharian penduduk dalam bidang pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya.

Lingkungan pendidikan pada hakikatnya dapat menjadi sumber pembelajaran. Teori pembelajaran *konstruktivisme* mengajarkan bahwa peserta didik harus dapat membangun pemahaman sendiri tentang konsep yang diambil dari sumber-sumber pembelajaran yang berasal dari lingkungan sekitar siswa.

Proses pendidikan seharusnya dapat menjadi agen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat agar warga masyarakatnya lebih hemat, gemar menabung, memiliki jiwa demokratis, dan menghormati hak azasi manusia, cinta damai dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, menanamkan semangat kerja keras, semangat antikorupsi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

5) Nilai-nilai Sosial Budaya

Di dunia ini terdapat negara yang maju, di samping negara yang miskin. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah faktor apa yang menyebabkan negara itu telah berkembang menjadi negara yang maju, sementara yang lain tidak? Apakah karena faktor (1) umur negara itu, (2) sumber daya alamnya, atau (3) faktor rasnya.

Ternyata, masyarakat negara yang maju memiliki nilai-nilai sosial budaya yang

dijunjung tinggi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu adalah sebagai berikut.

- a) Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Kejujuran dan integritas.
 - c) Bertanggung jawab.
 - d) Hormat pada aturan & hukum masyarakat.
 - e) Hormat pada hak orang/warga lain.
 - f) Cinta pada pekerjaan.
 - g) Berusaha keras untuk menabung & investasi.
 - h) Mau bekerja keras.
 - i) Tepat waktu.
- 6) Kebudayaan dan media Teknologi.

Menurut Koentjaraningrat, teknologi merupakan salah satu *faset* dari 7 (tujuh) *faset* kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan atau dihasilkan dari budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Bahasa Latin *colere*, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam hal ini kebudayaan diartikan sebagai usaha mengolah tanah atau bertani. *Culture* sering diterjemahkan dengan "kultur" dalam bahasa Indonesia (www.id.wikipedia.org). Misalnya *monokultur* artinya pertanian dengan satu macam jenis tanaman. Sebaliknya, *polikultur* artinya pertanian dengan beberapa macam tanaman.

Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat (*society*). Kebudayaan adalah produk dari masyarakat. Masyarakat telah melahirkan kebudayaannya sendiri, yang unik, yang berbeda dari kebudayaan yang telah dihasilkan kelompok masyarakat lain. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu

yang turun temurun yang telah dilahirkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sedang Andreas Eppink menjelaskan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, yang meliputi tata nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, yang merupakan keseluruhan kristalisasi intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas utama suatu masyarakat (www.id.wikipedia.org).

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap masyarakat akan melahirkan satu ciri kebudayaan yang unik, yang berbeda dengan kebudayaan yang lahir dari masyarakat di daerah yang lain. Keunikan tersebut menjadi karakteristik kebudayaan tertentu, dan menjadi esensi pembeda dengan kebudayaan lainnya.

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
1. Alat-alat teknologi.
 2. Sistem ekonomi.
 3. Keluarga.
 4. Kekuasaan politik.

- b) Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:

1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
2. Organisasi ekonomi.
3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama).
4. Organisasi kekuatan (politik).

- c) Sementara Koentjoroningrat menyebutkan adanya 7 (tujuh) unsur kebudayaan, atau yang disebut sebagai faset-faset kebudayaan atau "mata bajak" kebudayaan, yakni:

1. Sistem kepercayaan.
2. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial.
3. Sistem mata pencarian hidup.
4. Bahasa.
5. Sistem ilmu pengetahuan.
6. KESENIAN.
7. Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi).

Konsep dan Definisi Globalisasi

Globalisasi telah menjadi sebuah kata yang memiliki makna tersendiri dan seringkali kita baca dan dengar. Banyak pengguna istilah globalisasi memahaminya berbeda dari makna yang sesungguhnya. Realitas semacam ini bisa diterima mengingat tidak ada definisi yang tunggal terhadap globalisasi.

R. Robertson (1992) misalnya, merumuskan globalisasi sebagai: "... *the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole.*" Sementara, P. Kotter (1995) mendeskripsikan globalisasi sebagai, "...*the product of many forces, some of which are political (no major war since 1945), some of which are technological (faster and cheaper transportation and communication), and some of which are economic (mature firms seeking growth outside their national boundaries).*"

Tetapi, dalam tulisan ini cenderung mengutip pendapat J.A. Scholte (2002) yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori pengertian globalisasi yang umum ditemukan dalam literatur. Kelima kategori definisi tersebut berkaitan satu sama lain:

1) Globalisasi sebagai internasionalisasi

Dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang sekedar `sebuah kata sifat (*adjective*) untuk menggambarkan hubungan antar-batas dari berbagai negara'. Ia menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar-negara semakin terintegrasi menuju ekonomi global di mana `ekonomi nasional yang distingtif dilesap dan diartikulasikan kembali ke dalam suatu sistem melalui proses dan kesepakatan internasional'.

2) Globalisasi sebagai liberalisasi

Dalam pengertian ini, globalisasi merujuk pada `sebuah proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang `terbuka' dan `tanpa-batas.' Mereka yang berpendapat pentingnya menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan kontrol modal biasanya berlindung di balik mantel `globalisasi'.

3) Globalisasi sebagai universalisasi

Dalam konsep ini, kata `global' digunakan dengan pemahaman bahwa proses `mendunia' dan `globalisasi' merupakan proses penyebaran berbagai obyek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini adalah penyebaran teknologi komputer, televisi, internet, dll.

4) Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi (lebih dalam bentuk yang *Americanised*)

Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, di mana struktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dsb) disebarkan ke seluruh

penjuru dunia, yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak *self-determination* rakyat setempat.

5) Gobalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial (atau sebagai persebaran supra-teritorialitas)

Globalisi mendorong `rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial.' Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau serangkaian proses) yang melahirkan sebuah transformasi dalam *spatial organisation* dari hubungan sosial dan transaksi-ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya yang memutar mobilitas antar-benua atau antar-regional serta jejaringan aktivitas.

Era Globalisasi dan Penyebabnya

Menyikapi Kenyataan telah datangnya suatu era atau masa dimana dunia ini tampak kecil dan telah berubah menjadi datar, Thomas L. Friedman dalam bukunya *The World is Flat* menulis tentang beberapa faktor penyebabnya yaitu:

1) Runtuhnya Tembok Berlin

Ketika tembok berlin runtuh pada tanggal 9 Nopember 1989. Suatu simbol pemisah antara dunia blok Barat dan blok Timur telah diruntuhkan sehingga dunia kini menyatu. Juga pada saat bersamaan muncul Sistem Operasi Windows yang membawa manusia hidup bersama dan saling berinteraksi satu sama lain.

2) *Netscape went public*

Pada pertengahan tahun 1990-an perkembangan jaringan komputer berbasis Windows mencapai puncaknya. Pada saat ini diluncurkan suatu Web browser Netscape yang dapat membawa manusia untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia mengenai apapun, di manapun dia tinggal.

3) *Workflow Software*

Akhir abad 20 juga ditandai dengan kemajuan dalam bidang Software Workflow dimana seseorang dapat mengetahui suatu sistem dengan melihat workflow dari sistem

tersebut. Era ini juga ditandai dengan dikembangkannya VPN (*Virtual Private Network*) sehingga masing-masing institusi bisa saling berinteraksi dengan bantuan jaringan komputer yang bersifat private sehingga keamanan data dapat terjamin.

4) *Open Sourcing*

Dominasi Microsoft Windows pada sistem operasi dunia serta software aplikasi pendukung lainnya akhirnya dapat ditandingi dengan munculnya Software Open Source. Masyarakat di seluruh dunia dapat mengembangkan sistem komputer serta jaringannya dalam komunitas ini. Sistem ini tidak lagi didominasi oleh institusi tertentu (*Microsoft*).

5) *Supply Chaining*

Supply chaining menyebabkan dunia *men-deliver* semua kebutuhan dimulai dari keperluan sehari-hari sampai kebutuhan dengan teknologi tinggi dengan harga yang rendah. Era ini ditandai dengan munculnya toko *retail waralaba* besar yang merambah ke seluruh dunia.

6) *Informing*

Manusia dapat mencari informasi mengenai apa saja, dari mana saja. Hal itu dimungkinkan setelah dikembangkan Search Engine seperti Google, Yahoo atau MSN Search Engine. Dengan bantuan web browser maka kita dapat mencari informasi tersebut pada jaringan komputer dunia.

7) *The Steroids*

Manusia dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan melalui 4 cara *nirkabel*. Untuk jarak sampai 30 *inch* dapat menggunakan teknologi *inframerah*. Untuk jarak sampai 30 *feet* dapat menggunakan teknologi *bluetooth*. Untuk jarak sampai 150 *inch* dapat menggunakan teknologi *Wi-Fi*. Untuk dapat mencapai seluruh dunia dapat menggunakan bantuan *cell-phone* yang disambungkan dengan perangkat komputer. Dunia menjadi semakin semarak dengan dikembangkannya sistem digital, mobile, personal dan virtual.

Perspektif Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan Indonesia

Dalam summit APEC di Bogor tahun 1994, Indonesia dengan berani

menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan: "*Siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya*". Banyak pengamat menilai bahwa pada waktu itu Indonesia menyatakan '*siap*' dalam globalisasi kurang didasarkan pada asumsi yang realistis.

Dalam menilai kesiapan dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi ada baiknya kita mengukur posisi Indonesia dengan indikator-indikator-terlepas dari metodologi yang dipakai oleh pembuat survei yang dianggap cukup relevan, yaitu: tingkat kompetisi Indonesia di dunia global (*global competitiveness*), indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*), dan indeks pengembangan SDM (*human development index*).

Menurut indikator pertama, dalam tingkat kompetisi global tahun 2002, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 115 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-56, Vietnam pada posisi ke-60, dan Filipina pada posisi ke-66. Meskipun konfigurasi yang dibuat oleh *Global Economic Forum* ini lebih merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif, tetapi secara umum prestasi tersebut juga merefleksikan kualitas dunia pendidikan kita.

Dari sudut persepsi publik terhadap korupsi tahun 2002, hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Universitas Gottingen* menempatkan Indonesia pada urutan ke-122. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-83, Filipina pada posisi ke-92, dan Vietnam pada posisi ke-100. Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan pendidikan, dunia pendidikan kita bisa dianggap '*liable*' terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan belum mampu secara signifikan-menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan amanah.

Era pasar bebas memungkinkan masuknya lembaga pendidikan dan tenaga

pendidik yang mempunyai kemampuan internasional ke-Indonesia, untuk itu, kemampuan bersaing lembaga pendidikan dan tenaga pendidik harus ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas para tenaga pendidik, perlu juga sekaligus memberikan perlindungan profesi pada mereka dalam bentuk program lisensi, bagi semua pendidik dan mereka yang ingin meniti karier sebagai pendidik.

Program lisensi tersebut diperlukan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan yang akan diberikan agar sesuai dengan standar nasional, misalnya dengan kriteria minimal harus menguasai segala aspek standar kompetensi guru. Dan bagi warga negara asing yang akan menjadi tenaga pendidik di wilayah republik Indonesia, selain harus menguasai standar kompetensi guru juga diwajibkan menguasai bahasa Indonesia.

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung mengambil pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen? Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek *input*, tetapi juga prosesnya. Sehingga masih kurang memperhatikan dimensi *'proses'* ini sehingga mutu *outputnya* menjadi rendah.

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Salah satu kasus yang mengindikasikan lemahnya manajemen pendidikan kita adalah dikeluarkannya aturan oleh Depdiknas tentang standar kelulusan siswa SMP dan SMA dalam UAN dengan passing grade 5,50. Setelah muncul protes di banyak tempat *'memaksa'*

Depdiknas mengeluarkan aturan baru yang terlihat tergesa-gesa yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Padahal, niat Depdiknas tersebut sudah bagus yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan standar kelulusan. Angka 5,50 itu sebenarnya masih di bawah standar kelulusan internasional yaitu 6,0 umum dan 7,0 untuk bidang kejuruan. Hanya saja, kebijakan menaikkan standar kelulusan tersebut tidak diawali atau diiringi dengan peningkatan kualitas manajemen, guru, dan infrastruktur pendidikan secara signifikan.

Persepsi umum bahwa kebijakan pendidikan masih terkesan *"trial and error"* adalah seringnya perubahan yang tidak tuntas baik dalam tataran orientasi, kurikulum maupun sistem pembelajaran. Dalam beberapa kasus, faktor *'grant'* tampaknya bisa mengubah kebijakan pendidikan nasional menjadi proyek-proyek yang fragmentatif atau tidak komprehensif.

Pengenalan pendekatan pembelajaran 'Contextual Teaching and Learning (CTL)' misalnya masih terlihat sporadis dan-karena berbagai kendala khususnya anggaran-hanya sebagian kecil sekolah di Indonesia yang baru mampu melaksanakannya. Untuk itu juga akan dilihat apakah kasusnya sama dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai diterapkan tahun 2004 yang sekarang diperbarui dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Aspek adaptabilitas dan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan masih perlu dipikirkan dengan lebih serius. Meskipun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap di tangan pemerintah c.q. Mendiknas, tetapi sejalan dengan desentralisasi dan otonomi, sekolah sebagai pelaksana pendidikan sudah diberikan tanggung jawab dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemberlakuan UU Sisdiknas 2003 dan aturan-aturan lain yang merupakan penjabaran dari butir-butir legalitas yang statusnya lebih tinggi adalah salah satu contoh kebijakan yang ditimbulkan oleh

kecenderungan ini. Di beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan guru, dan ini perlu segera diantisipasi. Jelas di sinilah *policy* pemerintah sangat dibutuhkan dan juga menentukan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

Quo Vadis Pengembangan SDM Indonesia Menghadapi Globalisasi

Dalam kompetisi menghadapi globalisasi Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting. Bila tidak siap maka manusia Indonesia akan tergilas oleh globalisasi. Akan tetapi bila siap, maka kita akan sesuai dengan *quo vadis* pendidikan nasional dan menjadi sang pemenang. Secara sederhana *quo vadis* berasal dari bahasa latin yang artinya: "Kemana kamu pergi?" Secara sederhana sang pemenang pula dapat didefinisikan sebagai sikap pemenang (*winner*) yaitu:

Pertama, adalah mereka yang berada didepan perubahan, terus-menerus meredefinisi bidang kegiatannya, menciptakan pasar baru, membuat trobosan baru, menemukan kembali cara-cara berkompetisi, menantang *status quo*.

Kedua, pimpinan yg mau mendesentralisasi kekuasaannya dan mendemokratisasikan strateginya dengan melibatkan berbagai orang baik yg ada di dalam maupun di luar organisasinya dalam proses menemukan kiat untuk menghadapi masa depan.

Untuk menghadapi globalisasi dapat menerapkan kiat 3C yaitu:

- 1) Competence.
- 2) Concept.
- 3) Connection.

Dengan mengembangkan 3C di atas maka diharapkan akan terjadi peningkatan sumber daya manusia Indonesia menghadapi globalisasi.

PENUTUP

Artikel ini menyimpulkan berapa hal diantaranya:

Pertama, bahwa dalam berbagai takaran dan ukuran dunia pendidikan sekarang masih belum siap menghadapi

globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa ini akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Namun tetap menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi khususnya pada konteks regional, sehingga mengarah pada *quo vadis* masa depan pendidikan Indonesia semakin maju dan berkembang. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh.

Kedua, dunia pendidikan menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun dari uraian di atas, tetap optimis bahwa masih ada peluang.

Ketiga, alternatif yang ditawarkan dalam artikel ini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Untuk pendidikan formal dan formal perlu adanya integrasi antara dua mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan "kesalahan" dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Semakin besar kuantitas individu dan keluarga yang menyadari urgensi peranan keluarga ini, kemudian mereka membentuk jaringan yang lebih luas untuk membangun sinergi, maka semakin cepat tumbuhnya kesadaran kompetitif di tengah-tengah bangsa kita sehingga mampu bersaing di atas gelombang globalisasi ini, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah *visioning*, *repositioning strategy*, dan *leadership*.

Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta

kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi.

REFERENSI

- Abidin, Saiful. (2009). *Penerapan Konsep Pendidikan Multikultural*, H.A.R. Tilaar Pada Madrasah, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abuddin Nata. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner : Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*, cet. ke-2, Jakarta : Rajawali, Press.
- Amini, Ernie Isis Aisyah. (2005). *Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi Pada Siswa SLTP*, Singaraja: Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja.
- Azyumardi Azra. (2002). *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet.ke-4, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Banks, James A. (ed.). (1989). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Bennet, Tony. (1982). "Popular Culture: Themes and Issues" dalam *Popular Culture Arts in Amerika*, Open University Press, Milton Keyes.
- Berger. (1966). *Social Construction of Reality*, England: Penguin Books.
- Coombs, Philip H. (1985). *The World Crisis in Education*, The View From The Eighties, Oxford University Press.
- Creswell, John W. (2003). *Research Design, Quantative and Qualitative Approaches*, London: Sage Publication.
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan Pada Dan Setelah Krisis*, Yogyakarta.
- Friedman, Thomas L., *The World Is Flat*, Penerbit Farrar, Straus and Giroux, 2005.
- Fuad Hassan. (2004). Mantan Mendikbud, dalam buku, Widiastono, "Referensi Pendidikan Manusia Indonesia.
- Geertz, Clifford. (1973). 'The integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State' in *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books.
- Gollnick, Donna M. (1983). *Multicultural Education in a Pluralistik Society*. London: The CV Mosby Company.
- Gunaryadi. (2004). *Dunia pendidikan Indonesia di tengah arus globalisasi*.
- Haji Samsul Nizar dan Syaifuddin. (2010). *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Kalam Mulia.
- Hall, Stuart. (1999). "Cultural Identity and Diaspora" dalam Kathryn Woodward dkk. *Identity and Diaspora*. London: SAGE Publication.
- Hasan, Hamid. (2001). *Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*, makalah disampaikan pada seminar Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan kontribusi dalam penulisan artikel ini.

- Jalal, Fasli, *Reformasi Pendidikan, Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Penerbit Depdiknas-Bappenas-Adicita Karya Nusa.
- Karner, Christian. (2007). *Ethnicity and Everyday life*, Routledge, London, UK.
- Kotter, P. (1955). "The New Rules How to Succeed" in *Today's Post-Corporate World*, New York: The Free Press.
- Lubis, Akhyar Yusuf (2006). *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonial hingga Cultural Studies*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Mahfud, Choirul. (2010). *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masdar Farid Mas'udi. (2010). *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, cet.ke-1 (Jakarta : Pustaka Alvabet).
- Muhyar Fanani. (2008). *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Neuman, W. Lawrence. (1991). *Social Research Methods*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Nur, Agustiar Syah. (2002). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Penerbit Lubuk Agung Bandung.
- Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren (PSPP). (2007). *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PP RI No.55 Tahun 2007*, Ciputat : CV.Makmur Abadi.
- R. Robertson. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*, London: Sage Publications.
- Rossmann, Gretchen, B. and Sharon F. Rallis. (2003). *Learning in the Field*, London: SAGE Publications, Ltd.
- Scholte, J. A. (2000). *Globalization: A critical Introduction*, London: Palgrave.
- Sealy, John. (1985). *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Unwin.
- Shaw, Ian and Nick Gould. (2001). *Qualitative Social Work Research*, London: SAGE Publications.
- Sjarkawi. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan SD*, cet.ke-1, Jakarta: Gaung Persada-Press.
- Sumartana. (2001). *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Penerbit Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisma, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Penerbit Grasindo.
- U. Ubaidillah dan Abdul Rozak, et.al. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cet. ke-6, Jakarta: Prenada Media Group.